

Analisis Pengaruh PHK terhadap Penurunan Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Sepanjang Tahun 2025

¹Amanda Larasati, ²Airlangga Hadi Prawira Darmawan, ³Rayhan Magabi, ⁴Ahnan Fadiraafi Rasyid, ⁵Andjani Nayla Putri, ⁶Ahmad Setiawan Nuraya
^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, STIE Indonesia Banking School, DKI Jakarta
⁶Dosen Program Studi Manajemen, STIE Indonesia Banking School, DKI Jakarta

E-mail: ¹amanda.20241111035@ibs.ac.id, ²airlangga.20241111030@ibs.ac.id,
³rayhan.20241111032@ibs.ac.id, ⁴ahnanfadi32@gmail.com,
⁵andjani20241111037@ibs.ac.id, ⁶ahmad.nuraya@ibs.ac.id

ABSTRAK

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan literatur-literatur sebagai sumber data untuk menganalisa bagaimana pemutusan hubungan kerja (PHK) memengaruhi konsumsi dan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2025. Data berupa tulisan ilmiah diperoleh dari pencarian di laman *Google Scholar*. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sepanjang tahun 2025 telah menjadi determinan utama dalam penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat Indonesia secara signifikan. Fenomena ini bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan dampak kumulatif dari disrupsi rantai pasok global akibat kebijakan proteksionisme tarif Amerika Serikat sebesar 32% dan efisiensi anggaran belanja negara di tingkat domestik. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 88.000 pekerja telah kehilangan pendapatan tetapnya, yang menurunkan disposable income rumah tangga.

Kata kunci : *Daya Beli, PHK, Pemutusan Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan, Konsumsi*

ABSTRACT

Employment conditions are an important indicator in assessing a country's economic stability. This research is a descriptive qualitative study using literature as a data source to analyze how layoffs (PHK) affect consumption and purchasing power throughout 2025. Data in the form of scientific articles were obtained from a search on the Google Scholar page. The obtained data were then processed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the wave of layoffs (PHK) throughout 2025 has been a major determinant in the significant decline in consumption and purchasing power of the Indonesian people. This phenomenon is not a single event, but rather the cumulative impact of global supply chain disruption due to the United States' 32% tariff protectionist policy and state budget efficiency at the domestic level. Throughout 2025, 88,000 workers were recorded as having lost their fixed income, which reduced household disposable income.

Keyword : *Consumption, Employment, Purchasing Power, Layoffs, Termination of Employment*

1. PENDAHULUAN

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara (Sebriana & Hasanah, 2025). Selain berperan sebagai pelaku aktif kegiatan ekonomi, tenaga kerja juga merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional (Rosiana et al., 2025). Sepanjang tahun 2025, pasar ketenagakerjaan Indonesia diwarnai dengan beragam polemik, tak terkecuali pemutusan hubungan kerja (PHK).

PHK merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berakhirnya hubungan kerjasama profesional antara pekerja dan pemberi kerja (Sinlae et al., 2024). Jika ditelusuri lebih dalam, pemutusan hubungan kerja memiliki dampak berantai. Bagi individu, saat seseorang kehilangan pekerjaan utama, ia telah kehilangan penghasilan yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga, pemutusan hubungan kerja berarti perubahan pola hidup. Bagi perekonomian negara, tingginya tingkat PHK akan berimbas langsung pada penurunan *supply* dan *demand* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Pada tahun 2025, sektor ekonomi Indonesia mengalami guncangan, baik internal maupun eksternal. Polemik dunia menyebabkan kenaikan biaya produksi yang mendorong perusahaan melakukan beragam upaya untuk dapat bersaing ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Dari internal negara Indonesia, pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya operasional, serta persaingan dengan produk impor menjadi tantangan bagi banyak perusahaan.

Salah satu cara yang dilakukan untuk memangkas biaya produksi adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. Sepanjang tahun 2025, terdapat 98.127 tenaga kerja yang mengalami layoff. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, jumlah pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 71,37% (Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2026). Selain itu, lonjakan angka PHK juga meningkat pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Cahayo et al., 2026).



Gambar 1. Jumlah Tenaga Kerja yang mengalami PHK sepanjang 2024-2026

Kehilangan sumber pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat karena adanya perubahan pada struktur pendapatan yang mengharuskan masyarakat menghitung ulang skala prioritas dan penghematan ekstrim. Ketika seseorang tidak bekerja atau menganggur, hal itu akan memengaruhi pendapatan mereka, dan penurunan pendapatan masyarakat akan memengaruhi daya beli masyarakat (Zein, 2025). Disisi lain, konsumsi rumah tangga merupakan roda penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (Rezky et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana PHK sepanjang 2025 memengaruhi penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat pada saat itu. Kajian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak PHK terhadap kehidupan ekonomi masyarakat serta menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dan penurunan daya beli.

2. LANDASAN TEORI

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dilansir dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan berakhirnya suatu hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai akibat suatu hal tertentu yang melunturkan kewajiban dan hak pekerja terhadap pengusaha, dan sebaliknya (Presiden Republik Indonesia, 2020).

Berakhirnya perjanjian kerja dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, jika tenaga kerja telah mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan oleh undang-undang atau kebijakan perusahaan. Kedua, jika masa kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak yang berwenang, baik itu tenaga kerja maupun manajemen perusahaan. Ketiga, perjanjian kerja juga dapat berakhir apabila terdapat keputusan dari pengadilan atau lembaga persengketaan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang berdampak pada kondisi yang diatur dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, yakni tenaga kerja. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 13 pasal 61 tahun 2003.

Konsumsi

Konsumsi merupakan pembelanjaan rumah tangga atas suatu barang dan jasa (Takahindangen et al., 2021). Konsumsi dilakukan melalui pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan primer, komplementer, dan tersier. Konsumsi dapat berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, maupun kebutuhan tambahan seperti hiburan,

transportasi, dan barang-barang sekunder lainnya (Kinanti et al., 2024).

Kuantitas dan kualitas konsumsi sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan seseorang. Individu dengan pendapatan rendah memiliki pilihan yang terbatas terkait produk barang dan jasa yang dapat di beli sehingga mereka cenderung lebih selektif dalam mengeluarkan uang. Sebaliknya, individu dengan pendapatan yang relatif stabil memiliki pilihan yang lebih luas dan dapat memenuhi kebutuhan primer dan tersier. Ketika individu mengalami PHK, mereka memprioritaskan kebutuhan primer dan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Situasi ini menggambarkan hubungan antara utilitas dan stabilitas.

Apabila banyak pekerja mengalami PHK, maka konsumsi masyarakat secara keseluruhan dapat melemah. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro menyatakan bahwa konsumen berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari konsumsi barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Ketika terjadi kenaikan PPN, harga barang meningkat, menyebabkan garis anggaran konsumen bergeser ke dalam, sehingga kombinasi barang yang dapat dibeli berkurang (Sarlini et al., 2025).

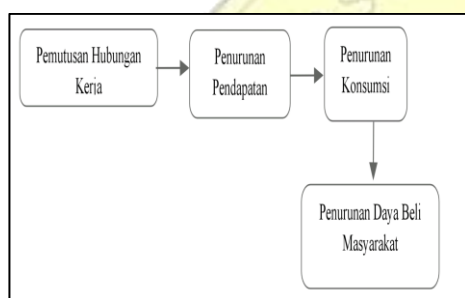
Daya Beli

Daya beli sangat berkaitan dengan minat konsumen. Minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk preferensi mereka di antara beberapa merek yang termasuk dalam pilihan yang tersedia, kemudian melakukan pembelian pada pilihan yang paling mereka sukai, atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa berdasarkan berbagai faktor (Cakranegara, 2022).

Harga memainkan peran alokasi dalam membantu konsumen menentukan cara memperoleh manfaat atau utilitas yang diharapkan paling besar dalam

menentukan daya beli produk. Akibatnya, keberadaan harga dapat membantu pembeli dalam menentukan cara mengalokasikan daya beli mereka ke berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga berbagai alternatif yang tersedia sebelum memutuskan alokasi dana yang tepat. Sementara itu, peran informasi harga memberi tahu pelanggan tentang kualitas produk yang ditawarkan. Ini mengacu pada manfaat dalam situasi di mana pembeli tidak dapat mengevaluasi faktor atau manfaat produk secara objektif (Cakranegara, 2022).

Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan literatur-literatur sebagai sumber data untuk menganalisa bagaimana pemutusan hubungan kerja (PHK) memengaruhi konsumsi dan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2025. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif umum digunakan untuk penelitian berbasis sosial guna memperoleh pengetahuan mendalam mengenai suatu fenomena di masyarakat yang tidak dapat dijelaskan oleh angka (Wulandari et al., 2025).

Data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan artikel-artikel penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan menelusuri laman *website* resmi pemerintah untuk memperoleh data terkait pemutusan hubungan kerja di Indonesia.

Data berupa tulisan ilmiah diperoleh dari pencarian di laman *Google Scholar*. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Cara pengolahan data ini dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun	Terdampak PHK	Deskripsi
2024	52.000 orang	Gelombang PHK di sektor manufaktur dan PT
2025	88.000 orang	Krisis akibat tarif dagang
2026	18.500 orang (Januari-Maret)	Inflasi

Tabel 1. Tren Gelombang PHK 2024-Maret 2026

Pada tabel 1 terlihat bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja telah dimulai sejak tahun 2024. Tercatat sebanyak 52.000 tenaga kerja mengalami pemutusan kerja sepanjang tahun 2024. Gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan jumlah *layoff* sebanyak 88.000 orang. Hal ini mengindikasikan sepanjang tahun 2025 telah terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja sebanyak 36.000 orang.

Jika gelombang PHK pada tahun 2024 didominasi sektor manufaktur, maka pemutusan kerja di tahun 2025 lebih diakibatkan perang dagang dan inflasi. Pemutusan hubungan kerja tampaknya masih akan terus berlanjut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap 18.500 orang dari Januari hingga Maret 2026.

Gelombang PHK yang berlangsung sepanjang tahun 2025 merupakan akibat dari guncangan ekonomi global dan transformasi struktural di dalam negeri. Ketegangan politik luar negeri telah mendisrupsi pantai pasok global dan menekan volume ekspor Indonesia (NetralNews, 2025). Mariana (2025) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terkonsentrasi pada sektor padat karya seperti industri tekstil dan produk tekstil. Sektor TPT memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi karena menyerap lebih dari 3,98 juta tenaga kerja yang mayoritas mengandalkan model produksi konvensional (Mariana, 2025). Ketidakmampuan sektor ini dalam bersaing dengan produk impor berharga murah, ditambah beban biaya operasional yang meningkat, memaksa perusahaan melakukan rasionalisasi (Tempo.co, 2025).

Kehilangan pekerjaan secara massal mengakibatkan mekanisme transmisi negatif terhadap perekonomian agregat. Konsumsi rumah tangga adalah penggerak Produk Domestik Bruto (PDB) utama di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja menyebabkan penurunan tajam pada pendapatan siap belanjakan (disposable income) rumah tangga (Maulana & Syifaurrehman, 2025). Saat individu dalam rumah tangga mengalami pemutusan hak kerja, rumah tangga harus menciptakan pola konsumsi yang baru. Pola ini umumnya hanya fokus pada pengeluaran primer, mengesampingkan konsumsi barang sekunder dan tersier (Maulana & Syifaurrehman, 2025). Apabila layoff terjadi secara massal, maka dapat dipastikan konsumsi barang di pasaran akan menurun drastis.

Variabel Terdampak	Deskripsi	Statistik
Konsumsi Rumah Tangga	Penurunan agregat akibat hilangnya pendapatan (Mariana, 2025).	Setiap 1% kenaikan PHK menurunkan konsumsi 0,3% - 0,5% (Mariana, 2025).

Omset UMKM	Lesunya pasar riil karena basis konsumen buruh hilang (Arisandi & Kusnadi, 2025).	Penurunan omset sebesar 15% - 25% (Mariana, 2025)
Deflasi Permintaan	Konsumen menunda belanja (Azzarah et al., 2025)	-0,76% (Jan 2025) & -0,37% (Mei 2025) (Azzarah et al., 2025).
Kredit Macet (NPL)	Ketidakmampuan bayar cicilan konsumsi (Mariana, 2025).	Naik dari 2,8% menjadi 3,2% di akhir 2024-2025 (Mariana, 2025)

Tabel 2. Korelasi Konsumsi dan Penurunan Daya Beli

Penurunan daya beli pada tahun 2025 mengakibatkan deflasi yang harus di garis bawahi sebagai tanda bahaya karena masyarakat cenderung menahan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap krusial saja (Tempo.co, 2025). Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1% tingkat PHK berpotensi menggerus konsumsi rumah tangga pada kisaran 0,3% hingga 0,5% (Mariana, 2025). Sayangnya, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangsih sebesar 60% terhadap PDB nasional.

Tingginya pemutusan hubungan kerja akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 0,15% hingga 0,25% per tahun (Maulana & Syifaurrehman, 2025). SINDOscope (2025), melansir bahwa menurutnya daya beli tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, namun akan mengancam kelangsungan ekonomi negara secara makro.

Pada tahun 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai angka Rp17.217 per USD (Agustina et al., 2025). Depresiasi nilai tukar mengakibatkan peningkatan biaya produksi bagi industri manufaktur dan memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Di saat yang sama, perusahaan berupaya mempertahankan biaya produksi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Saat PHK dan kenaikan harga barang terjadi dalam waktu bersamaan, individu yang

terdampak akan lebih selektif dalam mengeluarkan uang untuk belanja konsumsi. Sebagaimana dinyatakan oleh Arisandi & Kusnadi (2025), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan biaya produksi dan harga barang, serta bertambahnya tingkat pengangguran menempatkan Indonesia dalam risiko krisis moneter, di mana meluasnya defisit transaksi berjalan memperburuk ketidakseimbangan antara ekspor dan impor (Agustina et al., 2025).

Kondisi ekonomi di tahun 2025 juga diwarnai oleh paradoks antara inflasi biaya dan fenomena deflasi pada sisi permintaan (Azzarah et al., 2025). Data Badan Pusat Statistik mencatat terjadinya deflasi berturut-turut, yakni sebesar -0,76% pada Januari 2025 dan -0,37% pada Mei 2025 (Azzarah et al., 2025). Meskipun sekilas harga barang tampak menurun, deflasi ini sebenarnya mencerminkan lesunya permintaan masyarakat yang ekstrem, di mana konsumen cenderung menahan konsumsi karena ketidakpastian masa depan dan harapan akan penurunan harga yang lebih dalam (Azzarah et al., 2025). Penurunan minat konsumsi ini menyebabkan perputaran uang di tingkat mikro melambat drastis, yang pada akhirnya memicu krisis pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena produk yang tersedia di pasaran tidak mampu terserap oleh pembeli (Arisandi & Kusnadi, 2025).

Dampak domino dari melemahnya daya beli ini terlihat nyata pada penurunan performa sektor riil dan stabilitas keuangan (Mariana, 2025). Sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional melaporkan penurunan omset rata-rata berkisar antara 15% hingga 25% sepanjang paruh kedua tahun 2024 hingga 2025 (Mariana, 2025). Pukulan ini sangat dirasakan oleh pelaku usaha tradisional di mana kapasitas produksi mereka anjlok karena basis konsumen utamanya, yakni para pekerja manufaktur, telah kehilangan daya beli

pasca-terkena PHK (Maulana & Syifaurrehman, 2025; Arisandi & Kusnadi, 2025). Di sektor perbankan, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar juga merembet pada kegagalan pembayaran kredit, yang ditandai dengan kenaikan rasio kredit macet (*Non-Performing Loan*) sektor konsumsi dari 2,8% menjadi 3,2% (Mariana, 2025).

Secara keseluruhan, penurunan daya beli masyarakat tahun 2025 merupakan hasil dari lingkaran setan ekonomi yang dipicu oleh faktor geopolitik global dan diperburuk oleh kerapuhan pasar tenaga kerja domestik (Mariana, 2025; Agustina et al., 2025). Penurunan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia, diprediksi akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,15% hingga 0,25% per tahun jika tidak segera ditangani melalui kebijakan fiskal yang adaptif (Mariana, 2025; Agustina et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sepanjang tahun 2025 telah menjadi determinan utama dalam penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat Indonesia secara signifikan. Fenomena ini bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan dampak kumulatif dari disrupsi rantai pasok global akibat kebijakan proteksionisme tarif Amerika Serikat sebesar 32% dan efisiensi anggaran belanja negara di tingkat domestik. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 88.000 pekerja telah kehilangan pendapatan tetapnya, yang menurunkan *disposable income* rumah tangga.

Kaitan antara PHK dan daya beli terbukti secara kuantitatif melalui mekanisme *multiplier effect* negatif, di mana setiap kenaikan 1% pada tingkat PHK berkorelasi langsung dengan reduksi konsumsi rumah tangga pada kisaran

0,3% hingga 0,5%. Pelemahan ini semakin terkonfirmasi melalui fenomena deflasi berturut-turut pada Januari (-0,76%) dan Mei 2025 (-0,37%), yang mencerminkan kelesuan permintaan pasar akibat perilaku konsumen yang mulai membatasi belanja hanya pada kebutuhan subsisten. Dampak sistemik ini tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi nasional melalui potensi kontraksi PDB sebesar 0,15%–0,25% per tahun, tetapi juga memukul sektor riil dengan penurunan omset UMKM rata-rata mencapai 15%–25%

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, E., & Kusnadi, I. (2025). Strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi penurunan daya beli masyarakat: Upaya mempertahankan pendapatan dan lapangan kerja. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 161–172.
- Azzarah, R., Datu, S. M., Ma Rifat, A. A. B., & Az-Zukhri, H. (2025). Dampak deflasi dan melemahnya daya beli masyarakat terhadap krisis ekonomi mikro di Indonesia. *Sigaruda Journal*, 1(2), 302–309.
- Boumans, D., Fuest, C., Krolage, C., & Wohlrabe, K. (2020). Expected effects of the US tax reform on other countries: Global and local survey evidence. *International Tax and Public Finance*, 27(6), 1608–1630. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09618-1>
- Cahayo, R. G., Salsabila, J. I., Jihan, S., Ramadhani, S. R., & Salsabila, S. S. (2026). Apakah keputusan hubungan kerja (PHK) merupakan langkah yang efisien atau justru pelanggaran hak pekerja? *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(4), 3408–3424.
- Cakranegara, P. A., Kurniadi, W., Sampe, F., Pangemanan, J., & Yusuf, M. (2022). The impact of goods product pricing strategies on consumer purchasing power: A review of the literature. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 1115–1120.
- <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Laporan kajian dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025). RED Juli-August 2025 - EMF versi publish.
- Kinanti, A. F., Maulana, M. S., & Yasin, M. (2024). Analisis pola konsumsi di Indonesia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(2), 19–32. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2430>
- Mariana, W. I. (2025). Gelombang PHK sebagai ancaman nyata terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Al-Hasyimiyah*, 1(1), 26–41.
- NetralNews. (2025). PHK dan penurunan daya beli KMPE 2025 jadi tahun terberat bagi ekonomi Indonesia.
- NU Online. (2025). Kaleidoskop 2025: Target APBN meleset, PHK meluas, pengangguran meningkat, daya beli rakyat tertekan.
- Open Data Jabar. (2025). Daya beli melemah, PHK bertambah, Jabar berbenah.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan. (2026). Snapshot

- statistik ketenagakerjaan nasional: Potret kondisi ketenagakerjaan bulanan, edisi Februari 2026 (Vol. 1, No. 1). Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Fitriani, D., Hamonangan, M. G., Salim, H., & Fahta, A. I. A. (2025). Indonesia economic outlook Q2-2025: Memasuki pertumbuhan di bawah 5. LPEM FEB UI.
- Rosiana, A. V. S., Alensy, F., Salsabila, N. Z., & Rachman, A. A. (2025). Pengaruh ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(2), 1–10.
- Sarlini, H., Hutabarat, Y. D., Rahmayaani, E. S., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi barang kebutuhan sekunder oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 566–574. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>
- Sebriana, E. I., & Hasanah, S. H. (2025). Analisis indikator ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun 2023 dengan pendekatan clustering. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Seri III Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka*, 2(1), 1056–1068.
- Shafitri, A., Salsabila, D. N., Ayyasi, S., & Candra, M. (2025). Efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap PHK pekerja: Perspektif ekonomi politik dalam dinamika dunia tenaga kerja. *Hikamatzu Journal of Multidisiplin*, 2(2), 1–13.
- SINDOscope. (2025). PHK massal di awal 2025, akankah ekonomi baik-baik saja?
- Takahindangen, W. C., Rotinsulu, D. C., & Tumilaar, R. L. H. (2021). Analisis perbedaan pengeluaran konsumsi pengemudi ojek online Grab sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 37–46.
- Tempo.co. (2025). Daya beli masyarakat lesu di awal 2025: Deflasi, PHK massal, dan krisis global jadi pemicu utama.
- Wulandari, T., Sari, D. P., & Nasution, A. R. (2025). Deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan penelitian kualitatif. *Jurnal Literasiologi*, 11(2), 124–131. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- Zein, A. W., Al Farabi, A., & Permana, F. (2025). Dampak pemutusan hubungan kerja terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 2(3), 85–94. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1268>
- Zulkadrin, Citra L, A., Rahmawati, & Putri, O. A. (2025). Analisis badai inflasi hipotetis: Dampak dan respons kebijakan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia tahun 2025. *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 187–202. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah>